

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wilayah pesisir dan laut memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi global karena mencakup lebih dari 70% permukaan bumi serta menyediakan sumber daya alam yang vital bagi kehidupan manusia (Bayu et al., 2024). Selain menjadi penyedia pangan melalui sektor perikanan, kawasan ini juga berkembang sebagai destinasi pariwisata yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Namun, besarnya potensi tersebut diiringi oleh berbagai ancaman seperti abrasi pantai, eksploitasi sumber daya, alih fungsi lahan, dan pencemaran laut yang dapat merusak ekosistem serta menghambat pembangunan berkelanjutan (Azuga et al., 2025). Dalam kondisi ini, masyarakat yang tinggal di sekitar sumber daya pesisir bukan sekadar pihak yang terkena dampak, melainkan aktor yang keberadaannya menentukan arah dan keberlanjutan pemanfaatan kawasan tersebut, termasuk dalam pengembangan pariwisata.

Pembangunan pariwisata tidak dapat lagi diukur hanya dari pertumbuhan jumlah wisatawan atau peningkatan pendapatan daerah. Butler (1999) menegaskan bahwa keberlanjutan sebuah destinasi wisata bergantung pada keseimbangan antara kepentingan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial masyarakat yang hidup di kawasan tersebut. Sejalan dengan itu, Timothy (1999) menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat lokal dalam pariwisata setidaknya perlu dilihat dari dua sisi, yaitu sejauh mana mereka dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan sejauh mana mereka menikmati manfaat dari pengembangan pariwisata itu sendiri. Kedua sisi ini menunjukkan bahwa partisipasi bukan sekadar pelengkap dalam pembangunan pariwisata, melainkan syarat agar pembangunan tersebut berjalan secara adil dan berkelanjutan.

Sebagai upaya menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan di kawasan pesisir, konsep ekonomi biru (*blue economy*) hadir sebagai pendekatan integratif dalam pengelolaan sumber daya kelautan. *United Nations Environment Programme* mendefinisikan ekonomi biru sebagai pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghasilkan manfaat yang adil dan

inklusif, sekaligus melindungi serta memulihkan kesehatan ekosistem laut. Konsep ini dipopulerkan oleh Gunter Pauli dan kemudian diadopsi oleh berbagai organisasi internasional sebagai strategi pembangunan yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan lingkungan, dengan prinsip utama berupa efisiensi pemanfaatan sumber daya, inovasi, inklusivitas, serta penciptaan nilai tambah tanpa merusak ekosistem (Silver et al., 2021). *World Bank* (2021) juga menegaskan bahwa ekonomi biru berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di negara berkembang dengan wilayah pesisir yang luas. Ketika prinsip ini diterapkan pada sektor wisata bahari, inklusivitas hanya dapat terwujud apabila masyarakat pesisir dilibatkan secara nyata dalam setiap tahap pengembangan destinasi, bukan hanya diposisikan sebagai penerima dampak.

Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengimplementasikan konsep ekonomi biru dalam agenda pembangunan nasional. Dengan garis pantai sekitar 99.093 kilometer dan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia termasuk negara dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia serta potensi wisata bahari yang sangat besar (KKP, 2023). Pemerintah Indonesia menempatkan sektor kelautan sebagai prioritas pembangunan, sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025, dengan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia yang menegaskan komitmen negara dalam mengoptimalkan potensi kelautan secara berkelanjutan. Komitmen terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan ke-14 tentang ekosistem laut dan tujuan ke-8 mengenai pertumbuhan ekonomi inklusif, semakin menunjukkan relevansi pengembangan wisata bahari berbasis ekonomi biru dalam konteks pembangunan nasional (Bappeda, 2023). Namun, agenda besar ini pada akhirnya diuji pada level yang paling konkret, yaitu sejauh mana masyarakat di tingkat desa benar-benar dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program pengembangan wisata pesisir.

Provinsi Jawa Barat memiliki potensi pesisir yang sangat beragam dengan garis pantai sepanjang sekitar 725 kilometer yang membentang dari pantai utara hingga pantai selatan. Wilayah pesisir selatan yang berhadapan langsung dengan

Samudra Hindia menawarkan keindahan alam berupa ombak besar, pantai berpasir putih, dan formasi batuan karang yang eksotis (Suharyono, 2021). Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan sektor pariwisata sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah, dengan fokus khusus pada pengembangan wisata bahari di kawasan pesisir selatan, melalui berbagai program peningkatan kualitas destinasi, perbaikan infrastruktur pendukung, dan pemberdayaan masyarakat pesisir sebagai pelaku wisata (Bappeda, 2021). Kabupaten Cianjur menjadi salah satu wilayah yang menunjukkan potensi sekaligus tantangan tersebut, dengan garis pantai sekitar 75 kilometer di bagian selatan yang menyimpan destinasi bahari berdaya tarik alam yang relatif masih alami (Detik Jabar, 2022). Meningkatnya kunjungan wisatawan ke pantai-pantai selatan seperti Jayanti dan Apra diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat lokal (Antara News, 2025), meski pengembangannya masih dihadapkan pada keterbatasan infrastruktur, kebutuhan promosi yang lebih kuat, dan belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan destinasi.

Pantai Apra yang terletak di Desa Saganten, Kecamatan Sindangbarang, Kabupaten Cianjur, merupakan salah satu destinasi yang mulai berkembang dalam beberapa tahun terakhir, dengan karakteristik pasir besi hitam, ombak yang cukup besar namun relatif aman untuk berenang pada musim tertentu, serta pemandangan matahari terbenam yang menjadi daya tarik utamanya. Potensi wisata ini tidak hanya terletak pada keindahan alam, tetapi juga pada kearifan lokal masyarakat pesisir yang masih kental dengan tradisi nelayan dan budaya Sunda (Fadjarajani et al., 2021). Pada akhir pekan dan hari libur nasional, kunjungan wisatawan membuka peluang ekonomi bagi warga setempat melalui penyediaan jasa dan produk wisata (Irawan, 2025). Kondisi sosial-ekonomi masyarakat Desa Saganten sendiri masih didominasi oleh pekerjaan sektor primer seperti pertanian dan perikanan dengan tingkat kesejahteraan yang relatif terbatas, sementara infrastruktur dasar dan kapasitas pengelolaan wisata juga masih perlu ditingkatkan agar manfaat pariwisata dapat dirasakan lebih merata di antara warga.

Persoalan yang menarik untuk dikaji lebih jauh di Pantai Apra adalah bagaimana masyarakat sesungguhnya dilibatkan dalam setiap tahap pengembangan wisata tersebut. Observasi awal menunjukkan bahwa sebagian warga sudah terlibat dalam pelaksanaan kegiatan wisata secara langsung, seperti menyediakan warung

makan, jasa parkir, penyewaan penginapan, dan penjagaan tiket, namun keterlibatan ini lebih banyak berhenti pada tahap pelaksanaan dan belum menjangkau tahap pengambilan keputusan. Proses penentuan arah pengembangan wisata pantai masih didominasi oleh pihak-pihak tertentu, sementara suara masyarakat luas belum sepenuhnya terakomodasi, dan belum ada mekanisme kelembagaan yang jelas untuk mengorganisir masukan warga secara kolektif. Kondisi ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Cohen dan Uphoff (1980) bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan sesungguhnya berlangsung dalam empat bentuk yang saling berkaitan, yaitu keterlibatan dalam pengambilan keputusan (*participation in decision making*), keterlibatan dalam pelaksanaan (*participation in implementation*), keterlibatan dalam memperoleh manfaat (*participation in benefits*), dan keterlibatan dalam evaluasi (*participation in evaluation*). Empat dimensi ini memberikan pijakan untuk membaca secara lebih spesifik pada tahap mana partisipasi masyarakat Desa Saganten sudah berjalan dan pada tahap mana masih tersendat.

Persoalan partisipasi ini tidak berdiri sendiri, melainkan bertautan dengan persoalan ekonomi dan lingkungan yang sudah mulai tampak di Pantai Apra. Keterbatasan akses terhadap modal, informasi, dan jaringan menjadi penghalang bagi sebagian warga untuk berpartisipasi lebih aktif, dan jika kondisi ini tidak diperkuat sejak tahap awal pengembangan destinasi, terdapat risiko bahwa manfaat ekonomi wisata akan terpusat pada kelompok tertentu sementara masyarakat lain tetap berada dalam kondisi rentan (Rahayu & Nugroho, 2020; Devi & Rahaju, 2025). Isu lingkungan seperti sampah plastik di area pantai dan pengalihan fungsi lahan pesisir menjadi penginapan juga mengindikasikan bahwa pengembangan wisata belum banyak melibatkan masyarakat dalam fungsi pengawasan atau evaluasi, sehingga keputusan-keputusan yang berdampak pada lingkungan cenderung diambil tanpa mekanisme umpan balik dari warga yang sehari-hari hidup berdampingan dengan kawasan tersebut.

Kajian mengenai partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata bukan hal baru dalam literatur, dan kerangka Cohen dan Uphoff (1980) telah cukup banyak digunakan untuk membaca fenomena ini di berbagai destinasi di Indonesia, misalnya pada pengembangan objek wisata di Lampung Selatan (Hermawan &

Hutagalung, 2021), yang menemukan bahwa derajat partisipasi masyarakat dalam bentuk pemikiran, tenaga, dan materi memberikan respons yang berbeda-beda terhadap keberhasilan pengelolaan wisata. Di sisi lain, Tosun (2000) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di negara berkembang sering terhambat oleh keterbatasan operasional, struktural, dan kultural, mulai dari lemahnya mekanisme komunikasi hingga dominasi struktur kekuasaan lokal, yang membuat keterlibatan warga cenderung berhenti pada tahap pelaksanaan tanpa menjangkau pengambilan keputusan dan evaluasi. Pada sisi ekonomi biru, penelitian Airawati dkk. (2023) tentang potensi penerapan ekonomi biru dalam mendukung pariwisata berkelanjutan di kawasan pesisir Yogyakarta, serta kajian Anarta dan Darwis (2024) dan Aliim dan Darwis (2023) tentang pentingnya partisipasi dan kelembagaan lokal dalam pengembangan desa wisata, sama-sama menegaskan bahwa keberlanjutan wisata berbasis masyarakat sangat bergantung pada seberapa jauh warga dilibatkan, bukan hanya pada seberapa besar potensi alam yang tersedia.

Meskipun demikian, sebagian besar kajian tersebut lebih banyak dilakukan pada destinasi yang sudah relatif mapan atau kawasan konservasi, sementara penelitian pada destinasi pesisir yang baru bertumbuh dan secara khusus dibingkai dalam perspektif ekonomi biru masih terbatas, terutama di kawasan pesisir selatan Jawa Barat. Padahal, setiap wilayah memiliki karakteristik geografis, sosial-budaya, ekonomi, dan kelembagaan yang berbeda sehingga memengaruhi pola keterlibatan masyarakatnya (Cisneros-Montemayor et al., 2021). Dengan demikian, sejumlah penelitian telah membahas partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata maupun penerapan ekonomi biru secara terpisah, namun masih terdapat ruang kajian mengenai bagaimana keempat dimensi partisipasi Cohen dan Uphoff, yaitu pengambilan keputusan, pelaksanaan, penerimaan manfaat, dan evaluasi, berlangsung secara bersamaan pada destinasi pesisir yang masih dalam tahap awal pertumbuhan seperti Pantai Apra, dalam kerangka pengembangan wisata berbasis ekonomi biru.

Pemilihan teori partisipasi Cohen dan Uphoff (1980) dalam penelitian ini didasarkan pada kesesuaiannya dengan fokus kajian yang ingin dijawab. Cohen dan Uphoff (1980) menawarkan kerangka yang secara khusus memilah partisipasi ke dalam empat tahapan, yaitu keterlibatan dalam pengambilan keputusan,

pelaksanaan, penerimaan manfaat, dan evaluasi, sehingga memungkinkan peneliti mengidentifikasi secara spesifik pada tahap mana masyarakat Desa Saganten sudah berperan aktif dan pada tahap mana peran mereka masih minim. Kerangka ini dipandang lebih relevan untuk menjawab persoalan yang telah diuraikan sebelumnya, yakni pola partisipasi yang masih terkonsentrasi pada pelaksanaan namun belum menjangkau pengambilan keputusan dan evaluasi.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian tentang partisipasi masyarakat pesisir dalam pengembangan wisata Pantai Apra berbasis ekonomi biru menjadi relevan dan penting untuk dilakukan. Penelitian ini akan mengeksplorasi secara mendalam bagaimana masyarakat Desa Saganten berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, penerimaan manfaat, dan evaluasi pengembangan wisata Pantai Apra, serta faktor-faktor yang mendorong maupun menghambat keterlibatan tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran yang holistik dan kontekstual tentang dinamika partisipasi masyarakat dalam kerangka ekonomi biru, sekaligus memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan literatur partisipasi masyarakat serta rekomendasi praktis bagi pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan pengembangan wisata pantai yang partisipatif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian mengenai partisipasi masyarakat pesisir Desa Saganten dalam pengembangan wisata Pantai Apra berbasis ekonomi biru, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Identifikasi masalah ini disusun untuk memperjelas arah penelitian sekaligus menunjukkan urgensi analisis terhadap dinamika partisipasi masyarakat pesisir dalam konteks pengembangan wisata pantai berbasis pelestarian sumber daya laut.

Pertama, partisipasi masyarakat pesisir dalam pengembangan wisata Pantai Apra belum sepenuhnya merata dan konsisten. Meskipun terdapat keterlibatan aktif dari sebagian warga dalam kegiatan pengelolaan, seperti berdagang, menjaga kebersihan kawasan pantai, maupun terlibat dalam kegiatan rutin Pokdarwis dan KTH Cemara Udang, tidak seluruh masyarakat pesisir Desa Saganten berpartisipasi

secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan adanya variasi tingkat keterlibatan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu, di mana sebagian warga masih berada di luar sirkulasi partisipasi meskipun secara sosial merupakan bagian dari komunitas pesisir yang sama.

Kedua, terdapat faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi partisipasi masyarakat pesisir. Faktor pendukung seperti rasa memiliki terhadap kawasan Pantai Apra, kedekatan sosial antarwarga, serta manfaat ekonomi yang diperoleh dari aktivitas wisata mendorong keterlibatan masyarakat. Namun di sisi lain, ketidakpastian pendapatan akibat fluktuasi kunjungan wisatawan, keterbatasan akses informasi, rendahnya transparansi pengelolaan dana wisata, serta keterbatasan infrastruktur pengelolaan lingkungan menjadi hambatan yang memengaruhi stabilitas partisipasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat pesisir tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan kondisi sosial dan ekonomi yang melingkupinya.

Ketiga, dinamika hubungan sosial dalam pengelolaan taman memperlihatkan adanya interaksi yang kompleks antara masyarakat, pengelola, dan pihak luar. Di satu sisi, kegiatan bersama memperkuat solidaritas dan kerja sama. Namun di sisi lain, muncul pula potensi konflik yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi dan pembagian ruang usaha. Hal ini menandakan bahwa partisipasi masyarakat bersifat dinamis dan memerlukan pengelolaan yang tepat agar tetap kondusif.

Keempat, proses partisipasi masyarakat pesisir dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengembangan wisata Pantai Apra memperlihatkan adanya interaksi yang kompleks antara masyarakat, Pokdarwis, pemerintah desa, dan pihak eksternal seperti Dinas Kehutanan maupun mitra swasta. Di satu sisi, kegiatan bersama seperti gotong royong dan Jumat Bersih memperkuat solidaritas dan kerja sama antarwarga. Namun di sisi lain, tahap evaluasi masih berlangsung secara informal tanpa mekanisme yang terstruktur, sehingga memunculkan potensi ketidakpercayaan maupun spekulasi terkait pengelolaan dana retribusi wisata. Hal ini menandakan bahwa keterlibatan masyarakat pesisir dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, penerimaan manfaat, dan evaluasi bersifat dinamis dan

memerlukan pengelolaan yang tepat pada setiap tahapannya agar tetap kondusif dan berkelanjutan.

Kelima, belum terdapat kajian yang secara spesifik menganalisis partisipasi masyarakat pesisir Desa Saganten dalam pengembangan wisata Pantai Apra dengan menggunakan kerangka Teori Partisipasi Cohen dan Uphoff (1980). Padahal, empat dimensi partisipasi yang dikemukakan dalam teori tersebut, yaitu keterlibatan dalam pengambilan keputusan (*participation in decision making*), pelaksanaan (*participation in implementation*), penerimaan manfaat (*participation in benefits*), dan evaluasi (*participation in evaluation*), relevan untuk menjelaskan secara lebih spesifik pada tahap mana masyarakat pesisir sudah terlibat aktif dan pada tahap mana keterlibatan mereka masih minim dalam proses pengembangan wisata berbasis ekonomi biru.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis proses partisipasi masyarakat, bentuk partisipasi masyarakat pesisir, faktor-faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi dalam pengembangan wisata Pantai Apra, dengan menggunakan pendekatan Teori Partisipasi Cohen dan Uphoff (1980) sebagai kerangka analisis utama. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih sistematis mengenai bagaimana keempat dimensi partisipasi tersebut berlangsung dan saling berkaitan dalam mendorong keterlibatan masyarakat pesisir pada pengembangan wisata pantai berbasis ekonomi biru yang berkelanjutan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana proses partisipasi masyarakat pesisir dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengembangan wisata Pantai Apra?
2. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat pesisir dalam pengembangan wisata Pantai Apra?
3. Faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat pesisir dalam pengembangan wisata Pantai Apra berbasis ekonomi biru?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang sudah diuraikan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui proses partisipasi masyarakat pesisir dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengembangan wisata Pantai Apra.
2. Untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat pesisir dalam pengembangan wisata Pantai Apra.
3. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat pesisir dalam pengembangan wisata Pantai Apra berbasis ekonomi biru.

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, peneliti mengharapkan temuan pada penelitian ini akan memiliki manfaat akademik dan praktis di masa depan, antara lain sebagai berikut.

1. Kegunaan Secara Ilmiah
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai partisipasi masyarakat melalui penerapan Teori Partisipasi Cohen dan Uphoff (1980) dalam konteks pengembangan wisata pantai berbasis ekonomi biru. Penelitian ini berkontribusi pada penguatan pemahaman tentang bagaimana keterlibatan masyarakat pesisir dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, penerimaan manfaat, dan evaluasi memengaruhi keberhasilan proses pembangunan. Melalui eksplorasi empiris di Desa Saganten, penelitian ini berpotensi mengungkap bagaimana keempat dimensi partisipasi tersebut berlangsung secara nyata di lapangan, serta bagaimana pola keterlibatan itu membentuk hubungan antara masyarakat dan pemerintah dalam pengembangan wisata yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
 - b. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan interdisipliner yang menghubungkan sosiologi pariwisata, sosiologi ekonomi, dan

sosiologi masyarakat pesisir. Dengan mengkaji implementasi prinsip ekonomi biru di tingkat lokal, penelitian ini membuka ruang analisis baru mengenai bagaimana konsep global seperti *blue economy* diterapkan ke dalam praktik sosial di tingkat desa. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat pesisir, tata kelola lingkungan, serta pembangunan ekonomi yang berwawasan ekologi dan budaya.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Bagi pemerintah daerah Kabupaten Cianjur, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan strategis bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pengembangan wisata pantai berbasis ekonomi biru yang lebih partisipatif dan berkelanjutan. Hasil penelitian ini dapat membantu perumusan kebijakan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan sekedar objek program wisata. Selain itu, rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini dapat digunakan untuk memperbaiki pola koordinasi antar instansi, memperkuat kapasitas aparatur desa dalam tata kelola wisata, dan mengembangkan regulasi yang berpihak pada masyarakat lokal serta menjaga kelestarian lingkungan pesisir.
- b. Bagi masyarakat pesisir Pantai Apra Desa Saganten, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan potensi wisata pantai secara berkelanjutan. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk memperkuat kapasitas sosial dan ekonomi masyarakat melalui pelatihan kewirausahaan berbasis potensi lokal, seperti pengelolaan hasil laut, pengembangan kuliner khas pantai, dan penyediaan jasa wisata. Selain itu, penelitian ini dapat mendorong masyarakat untuk memelihara nilai-nilai budaya seperti gotong royong sebagai bagian dari daya tarik wisata yang bernilai edukatif dan spiritual. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat, diharapkan kesejahteraan

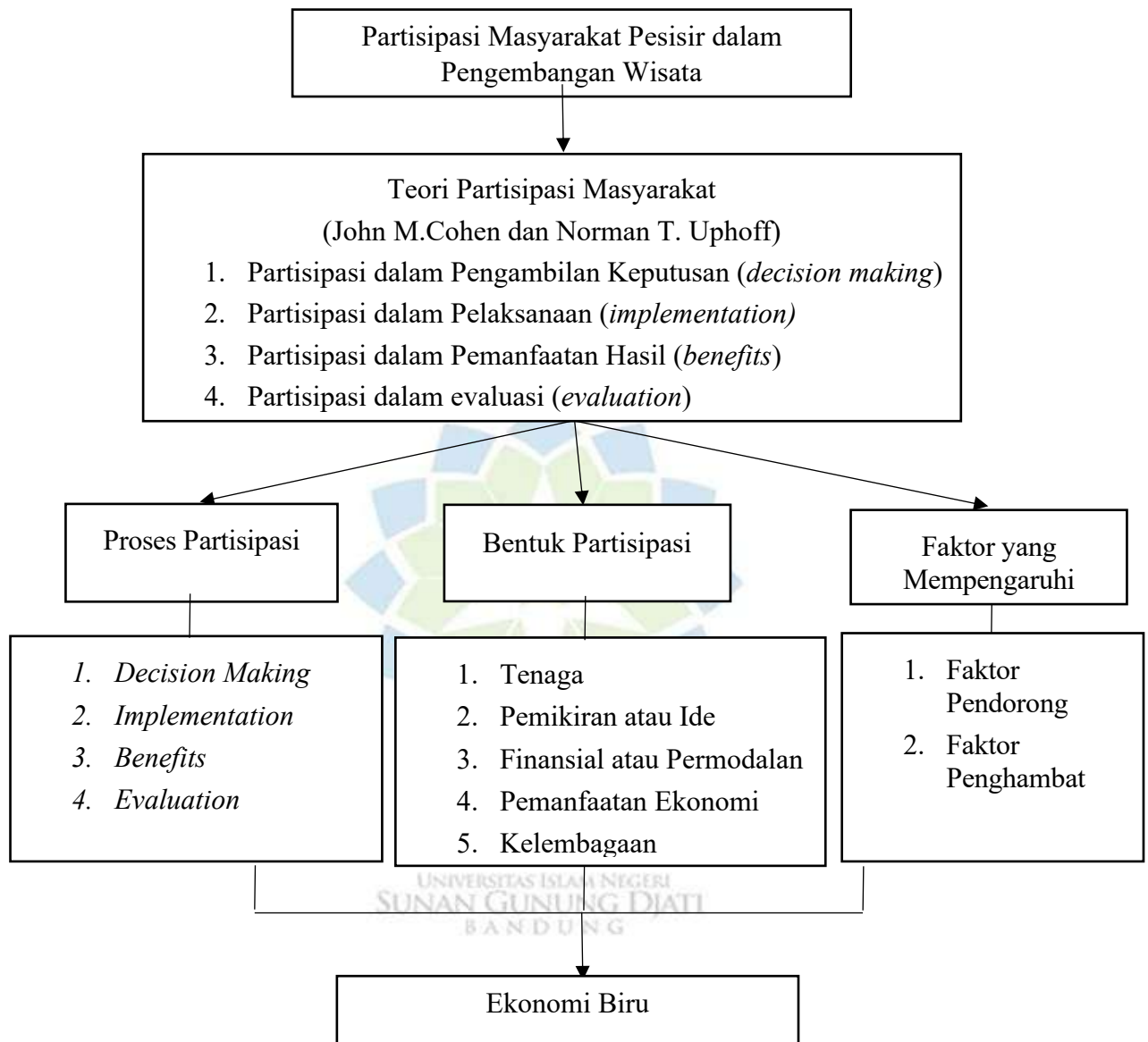
warga akan meningkat dan mewujudkan konsep ekonomi biru tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan laut dan pesisir.

- c. Bagi Akademisi, Peneliti, dan Praktisi pariwisata. Penelitian ini dapat menjadi referensi dan bahan perbandingan dalam kajian partisipasi masyarakat dalam sektor pariwisata, khususnya di kawasan pesisir. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh akademisi untuk mengembangkan model konseptual partisipasi masyarakat yang lebih adaptif terhadap kondisi sosial budaya lokal. Bagi praktisi dan pelaku industri wisata, temuan penelitian ini dapat menjadi dasar dalam merancang strategi pengembangan wisata yang berkeadilan sosial dan berkelanjutan secara ekologis. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi inspirasi bagi program tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat pesisir dan pelestarian ekosistem laut.

F. Kerangka Berpikir

Dalam membahas alur berpikir penelitian ini, diperlukan kerangka berpikir untuk memetakan konsep serta arah penelitian secara jelas. Kajian mengenai partisipasi masyarakat pesisir dalam pengembangan wisata Pantai Apra berbasis ekonomi biru menjadi fokus utama dalam menguraikan penelitian. Teori Partisipasi Cohen dan Uphoff (1980) digunakan sebagai pisau analisis untuk memahami bagaimana keterlibatan masyarakat dalam empat dimensi partisipasi, yaitu pengambilan keputusan, pelaksanaan, penerimaan manfaat, dan evaluasi, berlangsung dalam proses pengembangan wisata. Berikut merupakan kerangka berpikir yang menggambarkan alur penelitian ini.

Tabel 1.1
Kerangka Berpikir



Sumber: Diolah Peneliti, 2025

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, penelitian ini menggunakan Teori Partisipasi Cohen dan Uphoff (1980) sebagai landasan konseptual untuk menganalisis keterlibatan masyarakat pesisir dalam pengembangan wisata Pantai Apra di Desa Saganten. Cohen dan Uphoff menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak dapat dipahami sebagai satu bentuk keterlibatan yang tunggal, melainkan berlangsung melalui empat tahapan yang

saling berkaitan, yaitu pengambilan keputusan, pelaksanaan, penerimaan manfaat, dan evaluasi. Dalam konteks pariwisata berbasis ekonomi biru, keempat tahapan ini menjadi acuan penting untuk memahami sejauh mana masyarakat benar-benar berperan sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar pihak yang menerima dampak dari program wisata yang dijalankan.

Dalam perspektif Cohen dan Uphoff, partisipasi dalam pengambilan keputusan (*participation in decision making*) mencakup keterlibatan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah, menentukan kebutuhan, menyusun rencana, serta menetapkan prioritas program pengembangan wisata. Partisipasi dalam pelaksanaan (*participation in implementation*) tercermin dari kontribusi nyata masyarakat berupa tenaga, waktu, dana, material, maupun keterampilan dalam menjalankan kegiatan wisata sehari-hari. Partisipasi dalam penerimaan manfaat (*participation in benefits*) menunjukkan sejauh mana masyarakat memperoleh hasil dari pengembangan wisata, baik dalam bentuk manfaat ekonomi seperti pendapatan dan lapangan kerja, maupun manfaat sosial seperti peningkatan kapasitas dan kohesi warga. Sementara itu, partisipasi dalam evaluasi (*participation in evaluation*) berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dalam menilai, mengawasi, serta memberikan kritik dan saran terhadap pelaksanaan dan hasil program pengembangan wisata (Cohen & Uphoff, 1980). Keempat dimensi ini saling berkaitan dan bersama-sama menentukan sejauh mana pengelolaan wisata pantai berjalan secara inklusif dan berkelanjutan.

Melalui perspektif ini, partisipasi masyarakat tidak hanya dipahami sebagai kehadiran dalam kegiatan wisata, tetapi juga sebagai proses bertahap yang dimulai dari keterlibatan dalam menentukan arah pengembangan, berlanjut pada kontribusi nyata di lapangan, kemudian pada penerimaan manfaat yang dirasakan, hingga pada kemampuan masyarakat untuk turut mengawasi dan menilai hasilnya. Tingkat keterlibatan tersebut turut dipengaruhi oleh sejauh mana masing-masing tahapan ini terbuka bagi warga secara merata, sebab keterlibatan yang hanya terkonsentrasi pada satu tahapan, misalnya pelaksanaan, tanpa menjangkau pengambilan keputusan dan evaluasi, menunjukkan bentuk partisipasi yang belum utuh. Oleh karena itu, analisis melalui kerangka Cohen dan Uphoff membantu menjelaskan mengapa sebagian kelompok masyarakat lebih aktif terlibat pada tahapan tertentu

dibandingkan tahapan lainnya dalam pengembangan wisata Pantai Apra.

Dalam kerangka ekonomi biru, partisipasi yang berlangsung secara utuh pada keempat dimensi tersebut berkontribusi pada pengelolaan wisata yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai aktor yang turut menentukan arah pengembangan, menjalankan kegiatan wisata, serta mengawasi keberlangsungannya, termasuk dalam menjaga lingkungan pesisir sebagai aset wisata jangka panjang. Dengan demikian, teori Cohen dan Uphoff memberikan dasar analitis untuk memahami proses partisipasi masyarakat secara lebih spesifik dan bertahap, sekaligus menilai pada tahap mana partisipasi tersebut sudah berjalan dan pada tahap mana masih memerlukan penguatan agar pengembangan wisata pantai berbasis ekonomi biru dapat berlangsung secara berkelanjutan.

